



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : KURNIASIH PANTI RAHAYU
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 64783

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 6.316.629.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m<sup>2</sup>/85 m<sup>2</sup> di KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.506.002.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m<sup>2</sup>/76 m<sup>2</sup> di KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 909.534.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m<sup>2</sup>/73 m<sup>2</sup> di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m<sup>2</sup>/98 m<sup>2</sup> di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 590.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 434 m<sup>2</sup>/1002 m<sup>2</sup> di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 2.511.093.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 733.500.000**

1. MOTOR, HONDA CMX500AH Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOBIL, HONDA BR-V Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI BJ250L Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 49.500.000
4. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR SUPER CUB 800 Tahun 1983, WARISAN Rp. 2.000.000
5. MOTOR, VESPA PRIMAVERA IGET Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000



6. MOTOR, HONDA C125K Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
55.000.000
7. MOBIL, HONDA HR-V 1.5 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 640.000.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.427.285.224

F. HARTA LAINNYA Rp. 218.923.130

Sub Total Rp. 10.336.337.354

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 10.336.337.354

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.